



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Pattiro Singgung Penggunaan Dana BOS

Temuan BPK Cederai Pawai Budaya 2018

SERANG, BANPOS - Temuan BPK yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Serang, mengenai penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan aturan, kembali diungkit. Pasalnya, timbul kekhawatiran bahwa penyalahgunaan dana BOS tersebut, kembali terulang pada tahun ini.

Dalam LHP BPK tahun 2018, mayoritas penyalahgunaan dana BOS digunakan untuk membiayai sekolah dalam mengikuti agenda pawai budaya. Dari jumlah temuan sebesar Rp108.278.000, sebesar Rp65.942.000 digunakan untuk pawai budaya.

Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis

Dewanto, saat diwawancara BANPOS beberapa waktu yang lalu, mengakui adanya temuan BPK dalam penggunaan dana BOS. Menurutnya, kesalahan penggunaan dana BOS tersebut dikarenakan pihak sekolah menggunakan dana BOS, untuk kegiatan pawai budaya.

"Gini, waktu itu ada kegiatan pawai bu-

daya. Nah mereka menganggap bahwa kegiatan pawai budaya tersebut, dapat menggunakan dana BOS. Ternyata tidak, ujarnya saat ditemui oleh BANPOS, Kamis (25/7) lalu.

Wasis mengatakan, kesalahan penggunaan dana BOS tersebut, dikarenakan

BACA HAL-7

Pattiro Singgung...

Sambungan dari Halaman 8

pihak sekolah masih belum memahami, kegiatan apa yang dapat menggunakan dana BOS.

"Yah kan kadang-kadang sekolah ketika mau mengikuti kegiatan, yah dipakai saja (dana BOS). Padahal menurut BPK, itu bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah," katanya.

Direktur Pattiro Banten, Angga Andrias, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana BOS kembali. Hal ini menurutnya, apabila pengawasan dan pengendalian tim manajemen BOS masih lemah.

"Jika belum ada evaluasi menyeluruh pada tim manajemen

BOS Kota Serang, maka akan terulang kembali penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukannya," ujarnya kepada BANPOS, Minggu (25/8).

Angga mengatakan, jika kejadian penyalahgunaan dana BOS tersebut kembali terulang, dikarenakan adanya paksaan dari pihak panitia pawai budaya kepada pihak sekolah. Sedangkan pihak sekolah tidak memiliki anggaran, maka itu merupakan bentuk lemahnya penganggaran pemerintah.

"Kalau kegiatan pawai budaya ini ada dugaan memaksa pihak sekolah dan terpaksa pihak sekolah menggunakan dana BOS, artinya akan menjadi temuan berulang kepada BPK terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan," tuturnya.

"Seharusnya pemerintah Kota Serang sudah membuat perencanaan dan penganggaran terkait itu. Sehingga tidak membebankan pihak sekolah. Kalau

masih memaksa pihak sekolah untuk ikut namun tidak ada alokasi anggaran untuk itu, perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Serang masih lemah," lanjutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 tahun 2019, lanjutnya, pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan, harus memperhatikan kepatutan dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan.

"Dalam PP no. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 13, kan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan kepatutan dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Angga menuturkan, apabila kekhawatiran tersebut benar terjadi, maka dampak yang terjadi sangatlah besar. Selain sanksi untuk mengembalikan dana yang digunakan, ada kemungkinan dana BOS pada tahun berikutnya, akan diblokir.

"Jika terulang kembali, tidak hanya pengembalian dana yang sudah digunakan ke kas sekolah. Tapi kemungkinan juga sampai pemblokiran dana pada tahun berikutnya kepada daerah, jika sampai sengaja dan tersistem. Apa lagi sampai ada yang diuntungkan ke pihak tertentu," tegasnya.

Dengan adanya kemungkinan pemblokiran itu, lanjut Angga, akan mengakibatkan terganggunya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu, Angga juga mengatakan bahwa akan terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Serang.

"(Pemblokiran dana BOS) mengganggu jalannya KBM di sekolah dan pemenuhan kebutuhan siswa dalam belajar. Dana BOS hadir kan agar tidak ada biaya yang dibebankan ke siswa dalam KBM. Kalau dibebankan ke siswa kan nanti APMnya kemungkinan turun," tandasnya. (DZH/AZM)